Roadmap Reformasi Birokrasi



Komnas HAM 2015–2019

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) 2015-2019 telah selesai disusun. Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM ini adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Road Map Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM 2015-2019 disusun mengacu kepada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010, dan Road Map Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM 2010–2014 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010.

Reformasi Birokrasi di KOMNAS HAM dimulai sejak tahun 2010 dan telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM 4 (empat) kali yaitu 2014, 2015, 2016, 2017. Adapun hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KOMNAS HAM mendapatkan nilai Baik (BB)

Road Map Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM 2015-2019 diharapkan dapat meningkatkan nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi selanjutnya serta mewujudkan peningkatan kualitas pada 8 area perubahan yang telah berjalan sampai saat ini. Dan semoga Road map Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM 2015–2019 dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dalam rangka upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di KOMNAS HAM.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Sekretaris Jenderal

Tasdiyanto

NIP 197207201996031001

Sambutan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, atau lebih dikenal sebagai Reformasi Birokrasi, mulai mengemuka sejak tahun 2004. Reformasi birokrasi menjadi strategi Pemerintah dalam upayanya menciptakan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dalam kerangka filosofi, urgensi pelaksanaan reformasi birokrasi adalah mengkoreksi dan memperbarui secara terus-menerus dan berkelanjutan birokrasi pemerintah agar menjadi birokrasi baru yang lebih baik dan kuat sebagai elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari pelaksana Nawa Cita dan revolusi mental, KOMNAS HAM berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan dan meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, KOMNAS HAM berupaya melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.

Upaya yang telah dilakukan Kesesjenan KOMNAS HAM adalah sebagian dari pengejawantahan prinsip tata kelola administrasi lembaga yang baik yang senantiasa diterapkan di KOMNAS HAM yang merupakan perwujudan dari reformasi birokrasi.

Pelaksanaan nilai-nilai perubahan dalam reformasi birokrasi ini selalu berusaha diwujudkan dalam setiap pelayanan Sekretariat Jenderal sebagai bentuk dukungan pelaksanaan kewenangan KOMNAS HAM dalam melayani masyarakat pencari keadilan. Hal ini semata-mata agar kepercayaan publik terhadap KOMNAS HAM tercipta dan dapat terjalin dengan baik.

Oleh karena itu, saya menyambut baik terbitnya *Road Map* Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM 2015-2019. Saya berharap dengan terbitnya *road map* ini dapat memberi gambaran jelas mengenai reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KOMNAS HAM. *Road map* ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dalam rangka upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di KOMNAS HAM.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Ketua

Ahmad Taufan Damanik

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1
Sambutan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 3

BAB I PENDAHULUAN 5
A. Gambaran Umum 5
B. Arah Kebijakan Revolusi Mental Aparatur..... 6
C. Strategi Reformasi Birokrasi di KOMNAS HAM..... 7

BAB II PENCAPAIAN DAN PERMASALAHAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI 9
A. Pencapaian Reformasi Birokrasi 9
B. Permasalahan 32

BAB III RENCANA AKSI 33
A. Manajemen Perubahan 34
B. Penguatan Sistem Pengawasan 35
C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 36
D. Penguatan Kelembagaan 37
E. Penguatan Tata Laksana 37
F. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara 39
G. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan 45
H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 46
I. Quick Wins 47

BAB IV PENUTUP 53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

KOMNAS HAM berwenang melaksanakan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

KOMNAS HAM mengemban tugas tambahan melalui mandat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut.

KOMNAS HAM juga menjadi anggota dari unsur pemerintah bersama kementerian/lembaga lainnya dalam Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Reformasi Birokrasi yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga untuk berbenah diri dalam rangka memenuhi segala aspek yang ditetapkan. KOMNAS HAM sebagai lembaga setingkat lembaga negara lainnya juga melakukan berbagai upaya melalui pembenahan internal untuk dapat memenuhi syarat sebagai lembaga yang sudah melakukan Reformasi Birokrasi.

Keikutsertaan KOMNAS HAM dalam "gerbong" Reformasi Birokrasi dimulai sejak tahun 2010 sebagaimana Roadmap Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM 2010 – 2014. Pencapaian upaya pembenahan kelembagaan ditandai dengan masuknya KOMNAS HAM bersama dengan beberapa lembaga/kementerian lainnya sebagai lembaga yang telah memenuhi syarat sebagai lembaga yang melaksanakan reformasi birokrasi.

B. Arah Kebijakan Revolusi Mental Aparatur

Dalam penjelasan mengenai arah kebijakan Pemerintahan untuk mencapai tujuan nasional, Pemerintahan memiliki visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2025. Visi KOMNAS HAM selaras dengan visi Reformasi Birokrasi secara nasional adalah t*erwujudnya KOMNAS HAM sebagai katalisator dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia serta perlindungan kelompok marginal dan rentan.*

Visi ini dapat diwujudkan dengan tujuh misi, yang salah satunya berkaitan dengan fungsi KOMNAS HAM, yakni mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan hukum.

Terkait dengan visi dan misi, Pemerintah memiliki Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan yang disebut Nawa Cita. Dalam menerapkan reformasi birokrasi, KOMNAS HAM juga berpegang pada Nawa Cita tersebut, yakni membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi melalui upaya meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM.

Arah Reformasi Birokrasi pada KOMNAS HAM adalah tercipta dan terwujudnya Birokrasi KOMNAS HAM yang bersih, efisien, efektif, produktif transparan, melayani masyarakat, dan akuntabel

Sasaran reformasi birokrasi KOMNAS HAM adalah mengubah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set),* serta mewujudkan sistem mengelola perubahan untuk manajemen pemerintah dalam rangka mewujudkan *good governance*, *clean government*, transparan, akuntabel, profesional, dan bebas KKN.

C. Strategi Reformasi Birokrasi di KOMNAS HAM

KOMNAS HAM telah melakukan strategi dalam melaksanakan reformasi birokrasi, sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM;
b. Pembentukan *asesor* untuk menilai progres kegiatan reformasi birokrasi pada tiap-tiap unit kerja KOMNAS HAM;

c. Pelaksanaan pertemuan rutin tim pelaksana Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM;
d. Pembentukan sekretariat Reformasi Birokrasi; dan
e. Membuat laporan terhadap kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Perubahan-perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kerja KOMNAS HAM selama 5 (lima) tahun ke depan, untuk itu dibutuhkan pula *roadmap* reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh KOMNAS HAM. Agar pelaksanaannya nanti dapat lebih terarah dan mengena untuk peningkatan pelayanan publik oleh KOMNAS HAM, maka disusunkan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2015 – 2019 yang melanjutkan *roadmap* yang telah ada (2010 – 2014).

BAB II
PENCAPAIAN DAN PERMASALAHAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI

A. Pencapaian Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM pada periode 2015-2019 ditujukan untuk mencapai empat sasaran, yaitu: (1) reformasi pelayanan dan penanganan pengaduan; (2) reformasi mekanisme pelaksanan fungsi pemajuan HAM; (3) reformasi pemantauan dalam penyelidikan dan pemeriksaan serta mediasi pelanggaran HAM; dan (4) reformasi manajemen SDM.



Program reformasi birokrasi pada 8 area perubahan yang sedang dan akan dilakukan selama periode 2015 - 2019 untuk mewujudkan empat sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

AREA PERUBAHAN	2015		2016		2017		2018		2019	
A Manajemen Perubahan	**A.1**	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dilaksanakan pada Maret 2015.	**A.1**	Pembentukan anggota Tim Manajemen Perubahan dan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI), penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan pengusulan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Komnas HAM pada Juni –Agustus 2016	**A.1**	Pembentukan anggota Tim Manajemen Perubahan dan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI), penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan pengusulan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Komnas HAM	**A.1**	Penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan pengusulan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Komnas HAM	**A.1**	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
	A.2	Pembentukan Agen Perubahan yang mendorong terjadinya perubahan pola pikir dilaksanakan pada Oktober – November 2015							**A.2**	Pelaksanaan perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pelibatan yang kuat peran pimpinan menjadi raw model dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
	A.3	Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Komnas HAM ke publik					**A.2**	Sosialisasi ZI, WBK/WBBM dan publikasi penyediaan sarana media pembangunan ZI melalui FGD, pembuatan pamflet, spanduk, dan brosur		
	A.4	Penyusunan strategi manajemen perubahan dan	**A.2**	2. Pembangunan ZI melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM dan pengusulan Wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RB, dilaksanakan pada Juli 2016	**A.2**	Pembangunan ZI melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM, dan pengusulan wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RB	**A.3**	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	**A.3**	Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Komnas HAM ke publik
							A.4	Pelaksanaan perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pelibatan yang kuat peran pimpinan menjadi raw model dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM		

AREA PERUBAHAN	2015		2016		2017		2018	2019
A Manajemen Perubahan			**A.3**	Sosialisasi ZI, WBK/WBBM dan publikasi penyediaan sarana media pembangunan ZI melalui FGD, pembuatan pamflet, spanduk, dan brosur, pada Agustus 2016	**A.3**	Sosialisasi ZI, WBK/WBBM dan publikasi penyediaan sarana media pembangunan ZI melalui FGD, pembuatan pamflet, spanduk dan brosur		
			A.4	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	**A.4**	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM		
			A.5	Pelaksanaan perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pelibatan yang kuat peran pimpinan menjadi raw model dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, pada Juni – Agustus 2016	**A.5**	Pelaksanaan perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pelibatan yang kuat peran pimpinan menjadi raw model dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM		
					A.6	Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Komnas HAM ke publik		

AREA PERUBAHAN	2015		2016		2017		2018		2019	
B Penataan Peraturan Perundang-Undangan	**B.1**	Pembentukan unit kerja Subbagian Hukum dilaksanakan pada Maret 2015	**B.1**	Implemantasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Komnas HAM, dilaksanakan pada Februari – Juli 2016	**B.1**	Penyempurnaan dan Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Komnas HAM dengan melakukan:	**B.1**	Penyempurnaan dan penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Komnas HAM dengan melakukan:	**B.1**	Penyempurnaan dan penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Komnas HAM dengan melakukan:
	B.2	Pengangkatan Pejabat Struktural Subbagian Hukum pada Biro Umum dilaksanakan pada Desember 2015	**B.2**	Evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang sedang diberlakukan, dilaksanakan pada April –Desember 2016		B.1.1 Identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron		B.1.1 Identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron		B.1.1 Identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron
	B.3	Penyempurnaan dan penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Komnas HAM dengan melakukan:	**B.3**	Pelaksanaan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan, dilaksanakan pada April – Desember 2016		B.1.2 Analisis peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis		B.1.2 Analisis peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis		B.1.2 Analisis peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis
						B.1.3 Pemetaan dan revisi peraturan perundang-undanga yang tidak harmonis/tidak sinkron		B.1.3 Pemetaan dan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron		B.1.3 Pemetaan dan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron

AREA PERUBAHAN	2015	2016	2017	2018	2019
B Penataan Peraturan Perundang-Undangan	B.3.1 Identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron B.3.2 Analisis peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis B.3.3 Pemetaan dan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron B.3.4 Produk yang telah dihasilkan antara lain yaitu PERSES Tugas dan Ijin Belajar, PERSES Uraian Tugas Pejabat Struktural, PERSES tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Setjen Komnas HAM	**B.4** Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum, pada Juli – Desember 2016 **B.5** Konsultasi dan bantuan hukum dilaksanakan pada Januari – Desember 2016	**B.2** Konsultasi dan advokasi bantuan hukum	**B.2** Konsultasi dan advokasi bantuan hukum	**B.2** Konsultasi dan advokasi bantuan hukum

AREA PERUBAHAN	2015		2016		2017		2018		2019	
B Penataan Peraturan Perundang-Undangan	**B.4**	Penyusunan Pedoman tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Komnas HAM								
	B.5	Konsultasi dan advokasi bantuan hukum dilaksanakan pada Januari - Desember 2015								
C Penataan dan Penguatan Organisasi	**C.1**	Penyempurnaan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM dilaksanakan pada Pebruari 2015	**C.1**	Restrukturisasi struktur organisasi dengan Revisi Peraturan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komisi nasional Hak Asasi Manusia, dilaksanakan pada Maret – Oktober 2016	**C.1**	Restrukturisasi struktur organisasi dengan Revisi Peraturan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	**C.1**	Restrukturisasi struktur organisasi dengan Revisi Peraturan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	**C.1**	Restrukturisasi struktur organisasi dengan Revisi Peraturan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
			C.2	Penyusunan Naskah Akademik Revisi Peraturan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komisi nasional Hak Asasi Manusia	**C.2**	Penyusunan Naskah Akademik Revisi Peraturan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	**C.2**	Penyusunan Naskah Akademik Revisi Peraturan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	**C.2**	Implementasi dan evaluasi kesesuaian SOTK dengan restrukturisasi penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komnas HAM dan Perubahan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM

AREA PERUBAHAN	2015		2016		2017		2018		2019	
C Penataan dan Penguatan Organisasi			**C.3**	Monitoring dan evaluasi kelembagaan ASN di Komnas HAM, dilaksanakan pada April – Desember 2016	**C.3**	Implementasi dan evaluasi kesesuaian SOTK dengan restrukturisasi penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komnas HAM dan Perubahan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM	**C.3**	Monitoring dan evaluasi kelembagaan ASN di Komnas HAM	**C.3**	Penyusunan Naskah Akademik Revisi Peraturan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
			C.4	Implementasi dan evaluasi kesesuaian SOTK dengan restrukturisasi penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komnas HAM dan Perubahan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM, dilaksanakan pada September 2016			**C.4**	Implementasi dan evaluasi kesesuaian SOTK dengan restrukturisasi penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komnas HAM dan Perubahan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM		

AREA PERUBAHAN	2015		2016		2017		2018		2019	
D Penataan Tata Laksana	**D.1**	Penyempurnaan Prosedur Operasional Standar (SOP) dimasing-masing unit kerja dilaksanakan pada Januari – Desember 2015	**D.1**	Penyusunan peta proses bisnis Komnas HAM dan penyusunan SOP Komnas HAM, dilaksanakan pada April – Juni 2016	**D.1**	Penyempurnaan Prosedur Operasional Standar (SOP) di masing-masing unit kerja dilaksanakan pada Januari – Desember 2017	**D.1**	Penyempurnaan Prosedur Operasional Standar (SOP) dimasing-masing unit kerja dilaksanakan pada Januari – Desember 2018	**D.1**	Penyempurnaan Prosedur Operasional Standar (SOP) dimasing-masing unit kerja dilaksanakan pada Januari – Desember 2019
	D.2	Penyusunan dan pengembangan e-government yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi guna pengukuran kinerja lembaga dilaksanakan pada September 2015	**D.2**	Pemantauan penerapan pelaksanaan SOP dan evaluasi SOP di lingkungan Komnas HAM, dilaksanakan pada Maret – Desember 2016	**D.2**	Penyusunan dan pengembangan e-government yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi guna pengukuran kinerja lembaga dilaksanakan pada September 2017	**D.2**	Penyusunan dan pengembangan e-government yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi guna pengukuran kinerja lembaga	**D.2**	Penyusunan dan pengembangan e-government yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi guna pengukuran kinerja lembaga
	D.3	Pembuatan aplikasi SDM dan inovasi pelayanan publik yang berbasis teknologi (SIMPEG dan SKP) dan aplikasi tunjangan kinerja, perjalanan dinas (PERJADIN), pemantapan sistem informasi pengelolaan keuangan, penyempurnaan aplikasi keuangan (SISKA), aplikasi persuratan elektronik (SIMAYA), aplikasi pelayanan kerumahtanggaan, aplikasi pencatatan BMN, aplikasi CHS, aplikasi SPT online, pengembangan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan Pengembangan Unit Layanan Pengadaan (ULP), dilaksanakan pada Januari – Desember 2015	**D.3**	Penerapan sistem Kearsipan yang handal di Komnas HAM, dilaksanakan pada Mei – Agustus 2016	**D.3**	Pembuatan aplikasi SDM dan inovasi pelayanan publik yang berbasis teknologi (SIMPEG dan SKP) dan aplikasi tunjangan kinerja, perjalanan dinas (PERJADIN), pemantapan sistem informasi pengelolaan keuangan, penyempurnaan aplikasi keuangan (SISKA), aplikasi persuratan elektronik (SIMAYA), aplikasi pelayanan kerumahtanggaan, aplikasi pencatatan BMN, aplikasi CHS, aplikasi SPT online, pengembangan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan Pengembangan Unit Layanan Pengadaan (ULP), dilaksanakan pada Januari – Desember 2017	**D.3**	Penyempurnaan aplikasi SDM dan inovasi pelayanan publik yang berbasis teknologi (SIMPEG dan SKP) dan aplikasi tunjangan kinerja, perjalanan dinas (PERJADIN), sistem informasi pengelolaan keuangan, aplikasi keuangan (SISKA), aplikasi persuratan elektronik (SIMAYA), aplikasi pelayanan kerumahtanggaan, aplikasi pencatatan BMN, aplikasi CHS, aplikasi SPT online, Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), dilaksanakan pada Januari – Desember 2018	**D.3**	Penyempurnaan aplikasi SDM dan inovasi pelayanan publik yang berbasis teknologi (SIMPEG dan SKP) dan aplikasi tunjangan kinerja, perjalanan dinas (PERJADIN), sistem informasi pengelolaan keuangan, aplikasi keuangan (SISKA), aplikasi persuratan elektronik (SIMAYA), aplikasi pelayanan kerumahtanggaan, aplikasi pencatatan BMN, aplikasi CHS, aplikasi SPT online, Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), dilaksanakan pada Januari – Desember 2019
			D.4	Pengembangan teknologi informasi/manajemen kerja, dilaksanakan pada Januari – Desember 2016						
			D.5	Penataan dan pengembangan e-government yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi guna pengukuran kinerja lembaga, dilaksanakan pada April – Agustus 2016						

AREA PERUBAHAN	2015		2016		2017		2018		2019	
D Penataan Tata Laksana	**D.4**	Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilaksanakan pada September 2015	**D.6**	Pengembangan inovasi sistem informasi publik dan penggunaan teknologi informasi di Komnas HAM melalui penyempurnaan website, pelayanan kepegawaian, pelayanan keuangan, perencanaan (TETRA-SIMAK), pelayanan pengelolaan BMN di Komnas HAM, dilaksanakan pada Januari – Desember 2016	**D.4**	Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	**D.4**	Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	**D.4**	Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
	D.5	Penerapan sistem kearsipan yang handal di Komnas HAM dilaksanakan pada Januari – Desember 2015			**D.5**	Penerapan sistem kearsipan yang handal di Komnas HAM dilaksanakan pada Januari – Desember 2017	**D.5**	Penerapan sistem kearsipan yang handal di Komnas HAM dilaksanakan pada Januari – Desember 2018	**D.5**	Penerapan sistem kearsipan yang handal di Komnas HAM dilaksanakan pada Januari – Desember 2019
	D.6	Pengadaan yang akuntabel melalui e-catalog dan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan, dilaksanakan pada Januari – Desember 2015			**D.6**	Pengembangan inovasi sistem informasi publik dan penggunaan teknologi informasi di Komnas HAM melalui penyempurnaan website, pelayanan kepegawaian, pelayanan keuangan, perencanaan (TETRA-SIMAK), pelayanan pengelolaan BMN di Komnas HAM, dilaksanakan pada Januari – Desember 2017	**D.6**	Pengembangan inovasi sistem informasi publik dan penggunaan teknologi informasi di Komnas HAM melalui penyempurnaan website, pelayanan kepegawaian, pelayanan keuangan, perencanaan (TETRA-SIMAK), pelayanan pengelolaan BMN di Komnas HAM, dilaksanakan pada Januari – Desember 2018	**D.6**	Pengembangan inovasi sistem informasi publik dan penggunaan teknologi informasi di Komnas HAM melalui penyempurnaan website, pelayanan kepegawaian, pelayanan keuangan, perencanaan (TETRA-SIMAK), pelayanan pengelolaan BMN di Komnas HAM, dilaksanakan pada Januari – Desember 2019
	D.7	Pengembangan inovasi sistem informasi publik dan penggunaan teknologi informasi di Komnas HAM melalui penyempurnaan website, pelayanan kepegawaian, pelayanan keuangan, perencanaan (TETRA-SIMAK), pelayanan pengelolaan BMN di Komnas HAM, dilaksanakan pada Januari – Desember 2015	**D.7**	Penyusunan Pedoman/Prosedur Pengelolaan Kebijakan Informasi Publik di lingkungan Komnas HAM						

AREA PERUBAHAN	2015		2016		2017		2018		2019	
D Penataan Tata Laksana	**D.8**	Penyusunan Pedoman/Prosedur Pengelolaan Kebijakan Informasi Publik di lingkungan Komnas HAM	**D.8**	Pelaksanaan penerapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan informasi publik	**D.7**	Pelaksanaan penerapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan informasi publik	**D.7**	Penyusunan Pedoman/Prosedur Pengelolaan Kebijakan Informasi Publik di lingkungan Komnas HAM	**D.7**	Penyusunan Pedoman/Prosedur Pengelolaan Kebijakan Informasi Publik di lingkungan Komnas HAM
	D.9	Pelaksanaan penerapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan informasi publik							**D.8**	Pelaksanaan penerapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan informasi publik
E Penataan Sistem Manajemen SDM	**E.1**	Rekruitmen dan pelantikan Pejabat Struktural di Komnas HAM dilaksanakan pada Maret – Desember 2015	**E.1**	Penyusunan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merujuk pada struktur organisasi yang terbaru, dilaksanakan pada Agustus – September 2016	**E.1**	Penyusunan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merujuk pada struktur organisasi yang terbaru	**E.1**	Rekruitmen dan pelantikan pejabat struktural di Komnas HAM	**E.1**	Penyusunan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merujuk pada struktur organisasi yang terbaru
	E.2	Evaluasi jabatan dilaksanakan pada Januari – Juni 2015					**E.2**	Evaluasi jabatan		

AREA PERUBAHAN	2015		2016		2017		2018		2019	
E Penataan Sistem Manajemen SDM	**E.3**	Pengajuan kelas jabatan dan pemberian tunjangan remunerasi dilaksanakan pada Oktober 2015	**E.2**	Penyusunan proyeksi dan formasi kebutuhan pegawai dan rencana kebutuhan pegawai ASN di Komnas HAM, dilaksanakan pada Oktober – November 2016	**E.2**	Penyusunan proyeksi dan formasi kebutuhan pegawai dan rencana kebutuhan pegawai ASN di Komnas HAM	**E.3**	Perumusan dan penetapan kebijakan penerapan sistem penilaian kinerja individu (SKP)	**E.2**	Penyusunan proyeksi dan formasi kebutuhan pegawai dan rencana kebutuhan pegawai ASN di Komnas HAM.
	E.4	Penerapan reward and punishment terhadap tunjangan kinerja yang tertuang dalam proses tunjangan kinerja dilaksanakan pada Januari – Desember 2015	**E.3**	Perumusan dan penetapan kebijakan sistem penggajian pegawai ASN, dilaksanakan pada Juli – Agustus 2016	**E.3**	Penerapan kebijakan Sistem Jaminan Sosial Pegawai ASN, dilaksanakan pada Februari 2017	**E.4**	Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi	**E.3**	Penyempurnaan Analisa Jabatan
	E.5	Penyusunan standar kompetensi jabatan dilaksanakan pada Maret – Juni 2015	**E.4**	Penerapan kebijakan sistem penggajian pegawai ASN, dilaksanakan pada September – Desember 2016	**E.4**	Penyempurnaan Analisa Jabatan	**E.5**	Pelaksanaan open bidding dan fit and proper test untuk pejabat struktural/eselon	**E.4**	Asesmen individu berdasarkan kompetensi
	E.6	Perumusan dan penetapan kebijakan penerapan sistem penilaian kinerja individu (SKP) dilaksanakan pada Januari – Desember 2015	**E.5**	Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pensiun pegawai ASN, dilaksanakan pada September – Desember 2016	**E.5**	Evaluasi jabatan berupa pengajuan kelas jabatan dan pemberian tunjangan kinerja	**E.6**	Penyempurnaan penyusunan pedoman pola karir pegawai Komnas HAM	**E.5**	Penyusunan standar kompetensi jabatan

AREA PERUBAHAN	2015		2016		2017		2018		2019	
E Penataan Sistem Manajemen SDM	**E.7**	Penegakkan disiplin dan etika PNS melalui Memo Sesjen tentang Pemberitahuan Pemberlakuan Jam Kerja di Lingkungan Komnas HAM pada Juni 2015	**E.6**	Perumusan dan penetapan kebijakan sistem kebijakan jaminan sosial pegawai ASN, dilaksanakan pada Oktober – November 2016	**E.6**	Penyusunan standar kompetensi jabatan	**E.7**	Pengiriman PNS dalam diklat	**E.6**	Perumusan dan penetapan kebijakan penerapan sistem penilaian kinerja individu (SKP) dilaksanakan pada Januari – Desember 2019
	E.8	Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi dilaksanakan pada Januari – Desember 2015	**E.7**	Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen seleksi pegawai secara transparan dan berbasis kompetensi, dilaksanakan pada Juni – Juli 2016	**E.7**	Asesmen individu berdasarkan kompetensi	**E.8**	Pengembangan dan Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu, dilaksanakan pada Januari – Desember 2018	**E.7**	Pengukuran kinerja individu sebagai dasar pemberian reward and punishment dan penerapan penilaian kinerja pegawai di Komnas HAM
	E.9	Pelaksanaan open bidding dan fit and proper test untuk Pejabat Struktural/Eselon	**E.8**	Implementasi kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara terbuka secara transparan dan berbasis kompetensi sesuai dengan kebijakan nasional tentang Moratorium ASN, dilaksanakan pada Juli 2016			**E.9**	Pemberlakuan sistem presensi online, dilaksanakan pada Januari – Desember 2018	**E.8**	Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi
	E.10	Penyempurnaan penyusunan Pedoman Pola Karir Pegawai Komnas HAM	**E.9**	Perumusan dan penetapan kebijakan penerapan sistem penilaian kinerja individu (SKP), dilaksanakan pada Maret – April 2016			**E.10**	Revolusi mental pegawai di lingkungan Komnas HAM	**E.9**	Penyusunan analisis kebutuhan diklat pegawai ASN berbasis kompetensi
	E.11	Pelaksanaan mutasi dan rotasi sesuai kompetensi secara periodik dilaksanakan pada Desember 2015	**E.10**	Pengukuran kinerja individu sebagai dasar pemberian reward and punishment dan penerapan penilaian kinerja pegawai di Komnas HAM, dilaksanakan pada Mei – Desember 2016			**E.11**	Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	**E.10**	Pengiriman PNS dalam diklat

AREA PERUBAHAN	2015		2016		2017	2018	2019	
E Penataan Sistem Manajemen SDM	**E.12**	Pengembangan dan penguatan Jabatan Fungsional Tertentu yaitu Peneliti, Penyuluh, Auditor, Analis Kebijakan, Arsiparis, Perencana, dan Pranata Komputer, dilaksanakan pada Januari – Desember 2015	**E.11**	Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi, dilaksanakan pada Juni – Desember 2016			**E.11**	Pelaksanaan mutasi dan rotasi sesuai kompetensi secara periodik
	E.13	Pemberlakuan sistem presensi online dilaksanakan pada Januari – Desember 2015	**E.12**	Pelaksanaan open bidding, dan fit and proper test untuk Pejabat Struktural/Eselon			**E.12**	Pengembangan dan penguatan jabatan fungsional tertentu, dilaksanakan pada Januari – Desember 2019
			E.13	Penyempurnaan penyusunan Pedoman Pola Karir Pegawai Komnas HAM			**E.13**	Pemberlakuan sistem presensi online Januari – Desember 2019
			E.14	Pengiriman PNS dalam Diklat, dilaksanakan pada Januari – Desember 2016				

AREA PERUBAHAN	2015	2016		2017	2018	2019
E Penataan Sistem Manajemen SDM		**E.15**	Pengembangan Jabatan Fungsional Peneliti, Penyuluh Sosial HAM, Auditor, Analis Kebijakan, Arsiparis, dilaksanakan pada Januari – Desember 2016			
		E.16	Penyusunan Naskah Akademik pembentukan Jabatan Fungsional Analis Pengaduan, Pemantau HAM, Mediator HAM, dilaksanakan pada Januari – Desember 2016			
		E.16	Penyusunan Naskah Akademik pembentukan Jabatan Fungsional Analis Pengaduan, Pemantau HAM, Mediator HAM, dilaksanakan pada Januari – Desember 2016			

AREA PERUBAHAN	2015		2016		2017		2018		2019	
F Penguatan Akuntabilitas	**F.1**	Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja	**F.1**	Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi, dilaksanakan pada September 2016	**F.1**	Perumusan dan penetapan kebijakan penerapan sistem penilaian kinerja individu (SKP)	**F.1**	Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi	**F.1**	Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
			F.2	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit Kerja Komnas HAM, dilaksanakan pada Februari 2016	**F.2**	Pengukuran kinerja individu sebagai dasar pemberian reward and punishment dan penerapan penilaian kinerja pegawai di Komnas HAM				
					F.3	Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi				
					F.4	Penyusunan analisis kebutuhan diklat pegawai ASN berbasis kompetensi				

AREA PERUBAHAN	2015		2016		2017		2018		2019	
G Penguatan Pengawasan	**G.1**	Pembentukan Unit Pengawasan Internal Komnas HAM pada Februari 2015	**G.1**	Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting	**G.1**	Pemantauan capaian kinerja secara berkala yang dilaporkan per triwulan	**G.1**	Pemantauan capaian kinerja secara berkala yang dilaporkan per triwulan	**G.1**	Pemantauan capaian kinerja secara berkala yang dilaporkan per triwulan
	G.2	Pemantauan capaian kinerja secara berkala yang dilaporkan per triwulan dilaksanakan sejak awal April 2015	**G.2**	Perencanaan dan Penerapan Whistle Blowing System di lingkungan Komnas HAM, dilaksanakan pada Juni – Desember 2016	**G.2**	Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	**G.2**	Pelaksanaan public campaign pengendalian gratifikasi dan penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komnas HAM	**G.2**	Evaluasi internal akuntabilitas kinerja
	G.3	Evaluasi internal akuntabilitas kinerja dilaksanakan pada Februari – Maret 2015	**G.3**	Penyusunan Pedoman Whistle Blowing System di lingkungan Komnas HAM dalam bentuk SK Sekretaris Jenderal Komnas HAM, dilaksanakan pada Juli 2016	**G.3**	Pelaksanaan public campaign pengendalian gratifikasi dan penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komnas HAM	**G.3**	Pembangunan dan pengembangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komnas HAM melalui kegiatan:	**G.3**	Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
	G.4	Pelaksanaan public campaign pengendalian gratifikasi dan penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komnas HAM			**G.4**	Pembangunan dan pengembangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komnas HAM melalui kegiatan:	G.3.1	Tersosialisasinya materi SPIP kepada pejabat dan fungsional umum (PNS)	**G.4**	Penguatan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

AREA PERUBAHAN	2015		2016	2017		2018		2019
G Penguatan Pengawasan	**G.5**	Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting		G.4.1	Tersosialisasinya materi SPIP kepada pejabat dan fungsional umum (PNS)	G.3.2	Terselenggaranya bimbingan teknis dan FGD	
	G.6	Perencanaan dan penerapan Whistle Blowing System (WBS) di lingkungan Komnas HAM dilaksanakan pada Oktober 2015		G.4.2	Terselenggaranya bimbingan teknis dan FGD	G.3.3	Terbitnya laporan SPIP	
	G.7	Penyusunan Pedoman Whistle Blowing System di lingkungan Komnas HAM dalam bentuk SK Sekretaris Jenderal Komnas HAM pada Oktober 2015		G.4.3	Terbitnya laporan SPIP	G.3.4	Terdokumentasikannya peta SPIP atau laporan diagnostic assessment	
				G.4.4	Terdokumentasikannya peta SPIP atau laporan diagnostic assessment	G.3.5	Terdokumentasikannya laporan pengembangan unsur-unsur SPIP	
				G.4.5	Terdokumentasikannya laporan pengembangan unsur-unsur SPIP	G.3.6	Terdokumentasikannya kebijakan dan prosedur pada tiap unsur SPIP dan sub unsur SPIP (internalisasi tiap sub unsur SPIP)	
				G.4.6	Terdokumentasikannya kebijakan dan prosedur pada tiap unsur SPIP dan sub unsur SPIP (internalisasi tiap sub unsur SPIP)			
				G.4.7	Terdokumentasinya laporan secara periodik dan laporan monitoring SPIP	**G.4**	Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting	

AREA PERUBAHAN	2015	2016	2017		2018		2019
G Penguatan Pengawasan			**G.5**	Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting	**G.5**	Penguatan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	
			G.6	Perencanaan dan penerapan Whistle Blowing System di lingkungan Komnas HAM	**G.6**	Penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan	
			G.7	Penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan			
			G.8	Penguatan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)			

AREA PERUBAHAN	2015		2016		2017		2018		2019	
H Peningkatan Pelayanan Publik	**H.1**	Penyusunan aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu (One Stop Service) pada Februari – Desember 2015	**H.1**	Penyusunan aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu (SPT) one stop service	**H.1**	Penanganan pengaduan masyarakat melalui SPT online di Komnas HAM	**H.1**	Penyusunan aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu (SPT) one stop service	**H.1**	Penanganan pengaduan masyarakat melalui SPT online di Komnas HAM
	H.2	Penanganan pengaduan masyarakat melalui SPT online di Komnas HAM dilaksanakan pada Agustus – September 2015	**H.2**	Pengembangan inovasi pelayanan di Komnas HAM dengan melakukan program go green, dilaksanakan pada Oktober – November 2016	**H.2**	Penyempurnaan SOP standar pelayanan publik pada pelayanan pengaduan	**H.2**	Review perbaikan inovasi pengembangan standar pelayanan publik (layanan pengaduan Komnas HAM)	**H.2**	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam kegiatan pengumpulan kuesioner atas survey kepuasan terhadap pelayanan
	H.3	Penyempurnaan SOP standar pelayanan publik pada pelayanan pengaduan dan menyusun maklumat Standar Pelayanan pada Juli – November 2015	**H.3**	Lomba inovasi pelayanan publik terbaik (paling prima) di lingkungan Komnas HAM, dilaksanakan pada Oktober – November 2016	**H.3**	Penyusunan maklumat standar pelayanan	**H.3**	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam kegiatan pengumpulan kuesioner atas survey kepuasan terhadap pelayanan	**H.3**	Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis tentang kode etik, estetika, dan capacity building dalam penerapan pelayanan prima
	H.4	Pengembangan inovasi pelayanan di Komnas HAM dengan melakukan program go green pada Juni – Desember 2015	**H.4**	Review perbaikan inovasi pengembangan standar pelayanan publik (layanan pengaduan Komnas HAM)	**H.4**	Pengembangan inovasi pelayanan di Komnas HAM dengan melakukan program go green	**H.4**	Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis tentang kode etik, estetika, dan capacity building dalam penerapan pelayanan prima	**H.4**	Pemberian reward and punishment bagi pelaksana layanan publik dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan publik

AREA PERUBAHAN	2015		2016		2017		2018		2019	
H Peningkatan Pelayanan Publik	**H.5**	Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis tentang kode etik, estitika, dan capacity building dalam penerapan pelayanan prima	**H.5**	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam kegiatan pengumpulan kuesioner atas survey kepuasan terhadap pelayanan, dilaksanakan pada April 2016	**H.5**	Lomba inovasi pelayanan publik terbaik (paling prima) di Lingkungan Komnas HAM	**H.5**	Pemberian reward and punishment bagi pelaksana layanan publik dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan publik	**H.5**	Pengembangan aplikasi pelayanan pengaduan yaitu SPT online dan CHS yang mudah di akses oleh publik
	H.6	Pengembangan aplikasi pelayanan pengaduan yaitu SPT online dan CHS yang mudah di akses oleh Publik	**H.6**	Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis tentang kode etik, estetika, dan capacity building dalam penerapan pelayanan prima	**H.6**	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam kegiatan pengumpulan kuesioner atas survey kepuasan terhadap pelayanan				
	H.7	Pemberian reward and punishment bagi pelaksana layanan publik, dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan publik	**H.7**	Pemberian reward and punishment bagi pelaksana layanan publik dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan publik	**H.7**	Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis tentang kode etik, estetika, dan capacity building dalam penerapan pelayanan prima				
					H.8	Pemberian reward dan punishment bagi pelaksana layanan publik pemberian kompensasi kepada penerima layanan publik				
					H.9	Pengembangan aplikasi pelayanan pengaduan yaitu SPT online dan CHS yang mudah di akses oleh publik				

AREA PERUBAHAN	2015	2016	2017		2018	2019
F Penguatan Akuntabilitas			**F.5**	Pengiriman PNS dalam Diklat, dilaksanakan pada Januari – Desember 2017		
			F.6	Pengembangan dan penguatan Jabatan Fungsional Tertentu yaitu Peneliti, Penyuluh, Auditor, Analis Kebijakan, Arsiparis, Perencana, dan Pranata Komputer		
			F.7	Pemberlakuan sistem presensi online		
			F.8	Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)		
			F.9	Revolusi mental pegawai di lingkungan Komnas HAM		

Berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan Nomor: B/76/M.RB.05/2018 tertanggal 26 Februari 2018, Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM membaik. Pada tahun 2017, indeks RB Komnas HAM adalah 62,97 (B), meningkat dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 60,75 (CC).

Dengan demikian, ada kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi untuk mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik.

Adapun komponen penilaian yang dijadikan acuan ada dua komponen besar, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri atas manajemen perubahan; penataan peraturan perundang-undangan; penataan dan penguatan organisasi; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM; penguatan akuntabilitas; dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nilai Komnas HAM untuk komponen pengungkit adalah sebesar 34,87.

Sedangkan untuk komponen hasil, terdiri atas nilai akuntabilitas kinerja; survei internal integritas organisasi; survei eksternal persepsi korupsi; opini BPK; dan survei eksternal pelayanan publik. Nilai Komnas HAM untuk komponen ini adalah sebesar 62,97.

Menurut Kemenpan RB, Komnas HAM telah melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas reformasi birokrasi, meliputi penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dan Tim Reformasi

Birokrasi, penyelarasan peraturan perundang-undangan, usulan reorganisasi; dan evaluasi jabatan.

Sementara itu, untuk Survei Integritas Organisasi, nilai Komnas HAM mencapai 3,2 atau di atas rata-rata nilai kementerian/lembaga secara nasional sebesar 3,02. Sedangkan untuk Indeks Persepsi Anti Korupsi mencapai 3,52 dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik mencapai 3,24. Kedua nilai tersebut di atas nilai rata-rata nasional.

Kemenpan RB mengeluarkan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut reformasi birokrasi Komnas HAM, yaitu:

- Meningkatkan peran serta seluruh unit kerja dalam program RB;
- Menyelesaikan penyelarasan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan evaluasi dan penyempurnaan proses bisnis;
- Meningkatkan dukungan pada manajemen SDM;
- Meningkatkan kualitas penerapan manajemen kinerja;
- Melakukan evaluasi atas efektifitas kebijakan penguatan integritas;
- Mendorong pematangan tingkat Pengendalian Internal;
- Meningkatkan kapabilitas aparatur Pengendalian Internal;
- Reviu atas SOP Pelayanan Publik; dan
- Menghubungkan rewards dan punishment dengan capaian kerja organisasi dan individu.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2015 - 2019 masih menyisakan berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus menerus harus diperbaiki. Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya ketersediaan anggaran Komnas HAM untuk peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komnas HAM.
2. Terbatasnya SDM di Komnas HAM untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi baik di Kantor Komnas HAM Pusat dan di 6 Kantor Perwakilan Komnas HAM.

BAB III
RENCANA AKSI

Pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 di KOMNAS HAM disesuaikan dengan karakteristik KOMNAS HAM dan kemajuan yang telah diperoleh selama masa pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode sebelumnya.

Untuk mencapai maksud tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi pada KOMNAS HAM Tahun 2015–2019 mengikuti langkah-langkah umum, sebagai berikut:

1. Mengindentifikasi pelaksanaan yang telah dilaksanakan dan melakukan peningkatan.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang masih ditemukan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mencari solusi melalui program dan kegiatan yang diuraikan dalam tabel program, kegiatan dan anggaran Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM Tahun 2015-2019;
3. Mengidentifikasi kondisi yang diharapkan bagi KOMNAS HAM dimasa mendatang. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menyusun tahapan perencanaan dan implementasinya secara terstruktur untuk mencapai kondisi tersebut, melalui program dan kegiatan yang diuraikan dalam tabel program, kegiatan, dan anggaran Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM Tahun 2015-2019.

Adapun program dan kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi di KOMNAS HAM Tahun 2015 - 2019 dapat diuraikan di bawah ini.

A. Manajemen Perubahan

Tujuan dari program ini adalah untuk mengelola perubahan mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja birokrasi secara sistematis dan konsisten sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi KOMNAS HAM dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:

a. Meningkatnya komitmen KOMNAS HAM dalam melakukan reformasi birokrasi;
b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja (mental) birokrasi di KOMNAS HAM; dan
c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Kegiatan yang dapat diidentifikasi adalah:

a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran aparatur KOMNAS HAM untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
c. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;
d. Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir;
e. Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, dan penegakan disiplin;
f. Internalisasi secara terus menerus untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas;

g. *Public campaign* perubahan mental birokrasi untuk memberikan dorongan eksternal bagi penciptaan budaya kerja integritas;
h. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan; dan
i. Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga.

B. Penguatan Sistem Pengawasan

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KOMNAS HAM.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:

a. Meningkatnya independensi APIP di KOMNAS HAM;
b. Meningkatnya sinergi pelaksanaan pengawasan internal, eksternal dan masyarakat di KOMNAS HAM;
c. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di KOMNAS HAM;
d. Peningkatan opini audit laporan keuangan Komnas HAM menjadi WTP;
e. Meningkatnya pengendalian internal di KOMNAS HAM.

Kegiatan yang dapat diidentifikasi adalah:

a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di KOMNAS HAM;
b. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di KOMNAS HAM;
c. Pelaksanaan *whistleblowing system* di KOMNAS HAM;

d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di KOMNAS HAM;
e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja di KOMNAS HAM; dan
f. Penanganan pengaduan masyarakat di KOMNAS HAM.

C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber daya yang digunakan, serta meningkatkan kinerja organisasi KOMNAS HAM.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:

a. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan di KOMNAS HAM;
b. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan di KOMNAS HAM;
c. Meningkatnya efektivitas perencanaan dan penganggaran di KOMNAS HAM; dan
d. Meningkatnya transparansi informasi laporan keuangan dan kinerja di KOMNAS HAM.

Kegiatan yang diidentifikasi adalah:

a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala; dan
c. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja;

D. Penguatan Kelembagaan

Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong restrukturisasi kelembagaan KOMNAS HAM agar tepat fungsi, tepat ukuran dan bersinergi antar instansi sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:

a. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan di KOMNAS HAM;
b. Meningkatkan sinergi pelaksanaan fungsi dan kewenangan baik di dalam masing-masing unit kerja di lingkungan KOMNAS HAM maupun antara Perwakilan KOMNAS HAM;
c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di KOMNAS HAM;
d. Meningkatkan kinerja organisasi KOMNAS HAM; dan
e. Meningkatkan kualitas pelayanan di KOMNAS HAM.

Kegiatan yang diidentifikasi adalah:

a. Restrukturisasi kelembagaan KOMNAS HAM;
b. Implementasi struktur kelembagaan ASN di KOMNAS HAM;
c. Penguatan kelembagaan unit pelayanan ASN di KOMNAS HAM;
d. Monitoring dan evaluasi kelembagaan ASN di KOMNAS HAM; dan
e. Perbaikan berkelanjutan kelembagaan ASN di KOMNAS HAM.

E. Penguatan Tata Laksana

Tujuan dari program ini adalah untuk menyederhanakan proses manajemen pemerintahan melalui berbagai pendekatan termasuk penggunaan teknologi informasi dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di KOMNAS HAM.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:

a. Meningkatnya kecepatan berbagai proses dalam penyelenggaraan pemerintahan di KOMNAS HAM;
b. Meningkatnya efektivitas tata hubungan baik di dalam masing-masing unit kerja di lingkungan KOMNAS HAM;
c. Meningkatkan sinergi pelaksanaan fungsi dan kewenangan baik di dalam masing-masing unit kerja dilingkungan KOMNAS HAM maupun antar perwakilan KOMNAS HAM;
d. Meningkatnya efisiensi penggunaan anggaran di KOMNAS HAM; dan
e. Meningkatnya keterbukaan informasi publik.

Kegiatan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

a. Perluasan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi KOMNAS HAM;
b. Penyederhanaan proses bisnis di KOMNAS HAM;
c. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di KOMNAS HAM;
d. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di KOMNAS HAM;
e. Penerapan sistem kearsipan yang handal di KOMNAS HAM;
f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tata laksana di KOMNAS HAM; dan
g. Perbaikan program penguatan tata laksana yang berkelanjutan.

F. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

Tujuan dari program ini adalah untuk membangun dan memperkuat Sistem Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara di KOMNAS HAM dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan sesuai dengan tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:

a. Tertatanya sistem pengelolaan SDM ASN di KOMNAS HAM;
b. Meningkatnya integritas SDM ASN di KOMNAS HAM;
c. Meningkatnya netralitas SDM ASN di KOMNAS HAM;
d. Meningkatnya kesejahteraan SDM ASN di KOMNAS HAM;
e. Meningkatnya kompetensi SDM ASN di KOMNAS HAM;
f. Meningkatnya transparansi dalam rekrutmen pegawai ASN di KOMNAS HAM;
g. Meningkatnya ketepatan perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan dengan kompetensi dan kualifikasi calon pegawai/pejabat ASN di KOMNAS HAM; dan
h. Meningkatnya profesionalisme pegawai ASN di KOMNAS HAM.

Kegiatan yang diidentifikasi adalah:

a. Perencanaan Kebutuhan
    1) Penyempurnaan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN sebagai bagian dari peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan suksesi;

2) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai ASN di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN di KOMNAS HAM.

b. Pengendalian Jumlah Pegawai ASN
1) Penyempurnaan sistem pengendalian jumlah pegawai ASN di KOMNAS HAM;
2) Penerapan sistem pengendalian jumlah pegawai ASN di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi penerapan sistem pengendalian jumlah pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan penerapan sistem pengendalian jumlah pegawai ASN di KOMNAS HAM.

c. Pendistribusian Pegawai ASN
1) Perumusan kebijakan pendistribusian pegawai ASN di KOMNAS HAM;
2) Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan pendistribusian pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan
3) Perbaikan berkelanjutan kebijakan pendistribusian pegawai ASN di KOMNAS HAM.

d. Sistem Rekrutmen
1) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di KOMNAS HAM;
2) Implementasi kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di KOMNAS HAM;

3) Monitoring dan evaluasi Implementasi kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di KOMNAS HAM.

e. Sistem Promosi Secara Terbuka
1) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka di KOMNAS HAM;
2) Penerapan kebijakan sistem promosi secara terbuka di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi penerapan sistem promosi secara terbuka di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan sistem promosi secara terbuka di KOMNAS HAM.

f. *Assessment Center*
1) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan *assessment center*;
2) Penerapan kebijakan pemanfaatan *assessment center;*
3) Monitoring dan evaluasi kebijakan pemanfaatan *assessment center;* dan
4) Perbaikan berkelanjutan pemanfaatan *assessment center.*

g. Penilaian Kinerja Pegawai
1) Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai di KOMNAS HAM;
2) Penerapan kebijakan penilaian kinerja pegawai di KOMNAS HAM;

3) Monitoring dan evaluasi kebijakan penilaian kinerja pegawai di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan penilaian kinerja pegawai di KOMNAS HAM.

h. *Reward And Punishment* Berbasis Kinerja
1) Perumusan dan penetapan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja di KOMNAS HAM;
2) Penerapan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan *reward and punishment* berbasis kinerja di KOMNAS HAM.

i. Sistem Informasi ASN
1) Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di KOMNAS HAM;
2) Penerapan kebijakan sistem informasi ASN di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem informasi ASN di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan sistem informasi ASN di KOMNAS HAM.

j. Sistem Pengkaderan Pegawai ASN
1) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di KOMNAS HAM;
2) Penerapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di KOMNAS HAM;

3) Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan sistem pengkaderan pegawai ASN di KOMNAS HAM.

k. Pemanfaatan/Pengembangan *Data Base* Profil Kompetensi
1) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan *data base* profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di KOMNAS HAM;
2) Penerapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan *data base* profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi kebijakan pemanfaatan/pengembangan *data base* profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan pemanfaatan/pengembangan *data base* profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di KOMNAS HAM.

l. Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai ASN
1) Perumusan dan penetapan kebijakan/penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai ASN di KOMNAS HAM;
2) Penerapan kebijakan/penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai ASN di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi kebijakan/penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai ASN di KOMNAS HAM.

m. Pengendalian Kualitas Diklat

1) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di KOMNAS HAM;
2) Penerapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian kualitas diklat di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan pengendalian kualitas diklat di KOMNAS HAM.

n. Sistem Penggajian Pegawai ASN

1) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem penggajian pegawai ASN di KOMNAS HAM;
2) Penerapan kebijakan sistem penggajian pegawai ASN di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem penggajian pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan sistem penggajian pegawai ASN di KOMNAS HAM.

o. Sistem Pensiun Pegawai ASN

1) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pensiun pegawai ASN di KOMNAS HAM;
2) Penerapan kebijakan sistem pensiun pegawai ASN di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pensiun pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan sistem pensiun pegawai ASN di masing-KOMNAS HAM.

p. Sistem Jaminan Sosial Pegawai ASN

1) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem jaminan sosial pegawai ASN di KOMNAS HAM;
2) Penerapan kebijakan sistem jaminan sosial pegawai ASN di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem jaminan sosial pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan sistem jaminan sosial pegawai ASN di KOMNAS HAM yang berkelanjutan.

G. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih, dan mendorong iklim kondusif bagi publik maupun bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:

a. Meningkatnya sinergi antar instansi negara dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan;
b. Meningkatnya peran serta publik dalam perumusan kebijakan;
c. Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah;
d. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan; dan
e. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan.

Kegiatan yang diidentifikasi adalah:

a. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan;
b. Menyempurnakan/merubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan lain;
c. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan; dan
d. Merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dipandang diperlukan.

H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di KOMNAS HAM. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:

a. Meningkatnya kemudahan, kepastian, dan kecepatan proses pelayanan yang diberikan oleh KOMNAS HAM;
b. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan di KOMNAS HAM;
c. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan di KOMNAS HAM;
d. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan di KOMNAS HAM
e. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik di KOMNAS HAM;
f. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan di KOMNAS HAM; dan
g. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di KOMNAS HAM.

Kegiatan yang diidentifikasi adalah:

a. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP - *One Stop Service*) di KOMNAS HAM;
b. Percepatan pelayanan di KOMNAS HAM;
c. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan di KOMNAS HAM;
d. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di KOMNAS HAM;
e. Replikasi pelayanan publik terbaik di KOMNAS HAM;
f. Pengembangan inovasi pelayanan di KOMNAS HAM dengan melakukan program *Go Green*;
g. Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;
h. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
i. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
j. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;
k. Penerapan *reward and punishment* dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
l. Penguatan peran Inspektorat dalam pengendalian kualitas pelayanan publik.

I. Program *Quick Wins*

Program *quick wins* dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai outcome dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah.

a. Sistem Pelayanan Terpadu

Semakin tingginya jumlah pengaduan masyarakat kepada KOMNAS HAM dari waktu ke waktu membutuhkan sistem layanan pengaduan yang terpadu dan efektif. Terakhir tahun 2014 jumlah pengaduan yang masuk berjumlah 1000-an.

KOMNAS HAM sejak 2013 sudah menerapkan Program Sistem Pengaduan Terpadu (SPT) dengan kegunaan tidak hanya mendata pengaduan dan/atau berkas pengaduan yang masuk namun juga dilengkapi analisa dari para petugas. Program SPT diterapkan secara online sehingga mudah diakses dimanapun bagi petugas penanganan kasus. Selain itu, SPT dapat memudahkan pencarian berkas dimanapun petugas penangan kasus berada, mempersingkat waktu proses pengerjaan kasus sampai keluar rekomendasi atau tindak lanjut, paperless, dan mengefisiensi dan efektifitas kerja penanganan pengaduan. Secara sederhana, pengadu hanya menggandalkan *web browser* dan *data based* yang telah online untuk memproses berkas pengaduan melalui program SPT, selanjutnya beberapa proses yang yang mudah dapat dilalui sampai berkas ditindaklanjuti dan divalidasi oleh KOMNAS HAM dengan baik. Ke depan pengembangan program SPT perlu semakin ditingkatkan diantaranya dengan memberikan kemudahan bagi pengadu untuk dapat mengakses dan membuka berkas pengaduan yang sudah ditangani dan ditindaklanjuti. Dengan sistem yang lebih transparan, diharapkan penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

b. Program Sekolah Ramah HAM: Pilot Project Penerapan Nilai-Nilai HAM dalam Dunia Pendidikan

Program Sekolah Ramah HAM KOMNAS HAM pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA merupakan sebuah terobosan untuk merespon munculnya berbagai kasus HAM yang kerap terjadi di institusi pendidikan, seperti sekolah. *Pilot project* sekolah ramah HAM yang sudah dilakukan tahun 2015 diharapkan bisa menghasilkan sebuah indikator mengenai kriteria sekolah ramah HAM yang jika diterapkan dapat menstimulus penerapan nilai-nilai HAM yang berimplikasi pada berkurangnya kasus diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah melainkan di lingkungan luar sekolah dimana para siswa dikemudian hari berinteraksi dan bergaul dengan masyarakat luas. Lebih lanjut, indikator Sekolah Ramah HAM seharusnya memuat 'cikal bakal' pembentukan *mind-set* dan mental individu yang baru terkait hak asasi manusia.

c. Penyusunan indikator Kota Ramah HAM

Dalam arti praktis, kota ramah HAM memiliki arti bahwa semua penduduk, tanpa memandang ras, jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, latar belakang etnis dan status sosial, khususnya kaum minoritas dan kelompok rentan lainnya yang secara sosial rentan dan terpinggirkan, dapat berpartisipasi secara penuh dalam pengambilan keputusan dan proses implementasi kebijakan yang mempergaruhi kehidupan mereka sesuai dengan prinsip – prinsip HAM, seperti non diskiriminasi, supremasi hukum, partisipasi, pemberdayaan, transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks Indonesia dimana otonomi daerah memberikan kewenangan pemerintah daerah yang cukup besar untuk mengelola wilayahnya

sendiri, kota ramah HAM juga dipahami sebagai tata laksana HAM dalam konteks lokal dimana pemerintah daerah, DPRD, masyarakat sipil, organisasi sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua penduduk dalam semangat kemitaraan bersadarkan standar dan norma – norma HAM. Ke depan, sebagai salah satu program andalan Komnas HAM, program kota ramah HAM seharunya diawali dengan melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan beberapa kota di beberapa provinsi Indonesia. Dampak dari MOU adalah adanya komitmen bersama antara kota-kota Provinsi/Kabupaten dan Komnas HAM untuk ke depan dapat menyusun regulasi berbasis HAM, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

d. *Pilot Project* Implementasi Indikator HAM Bidang Kesehatan, Pendidikan, Pangan, dan Perumahan

   Empat indikator HAM yang telah disusun KOMNAS HAM, mencakup hak atas kesehatan, pendidikan, pangan, dan perumahan sangat berguna untuk mengukur sejauh mana kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhan empat hak dimaksud. Indikator HAM merupakan alat ukur yang berbeda dengan alat ukur lain yang sudah berkembang, seperti *Human Development Index (HDI)*. Indikator HAM bukanlah *brancmark* (menggunakan standard angka-angka semata), melainkan alat ukur yang fokus pada tiga aspek utama, yakni: struktur (legislasi), Proses (Program/kebijakan pemerintah), dan Hasil (penikmatan hak bagi pemangku hak).

Di beberapa negara, seperti di Afrika Selatan, penyusunan indikator HAM sudah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya index HAM yang kemudian dijadikan pegangan bagi setiap negara untuk menyusun program dan kebijakan ke depan. Hasil yang diperoleh cukup signifikan, setiap instansi terkait kemudian menyusun program dan kebijakan dalam pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.

e. Penataan KOMNAS HAM yang Ramah dan Manusiawi

Penataan KOMNAS HAM yang ramah dan manusiawi akan dapat memberikan dampak positif kepada proses pemberian layanan dan kenyamanan kerja karyawan KOMNAS HAM. Proses pemberian layanan kepada masyarakat termasuk pengaduan dapat diberikan dengan baik, melalui penerapan pelayanan yang ramah, cepat dan efektif dan didukung dengan suasana dan kondisi gedung dan ruangan yang nyaman serta ramah lingkungan. Suasana dan sarana yang ramah dan manusiawi tersebut termasuk ramah terhadap para penyandang disabilitas. Kenyamanan kerja karyawan di lingkungan KOMNAS HAM akan tercipta apabila didukung oleh sarana dan pra sarana yang ramah dan manusiawi

Untuk memudahkan membaca, berikut Tabel *Quick Wins* berikut capaian berupa produk dan dampaknya:

No	Quick Wins	Capaian	
		Produk	Dampak
1.	Sistem Pelayanan Terpadu	Website dan *online data based*	Kemudahan pengaduan mengakses dan membuka berkas pengaduan yang ditangani dan ditindaklanjuti
			Tranparansi
2.	Program Sekolah Ramah HAM : Pilot Project Penerapan Nilai-Nilai HAM dalam Dunia Pendidikan	Buku Pendamping Guru untuk Pembelajaran PPKn di tingkat SMA/ SMK	Bentuk implementasi dari Program Revolusi Mental Pemerintahan Jokowi-JK melalui revolusi karakter bangsa dengan program aksi di bidang pendidikan
		Panduan Pelaksanaan Sekolah Ramah HAM	Sekolah Ramah HAM memberikan model sistem pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan HAM dalam sistem pendidikan formal.
		Percontohan Sekolah Ramah HAM	Menjadi kerangka pikir dalam proses penyusunan program strategis pendidikan dan penyuluhan HAM sebagai implementasi Deklarasi PBB tahun 2011 tentang Pendidikan dan Pelatihan HAM.
3.	Program Kota Ramah HAM	Pedoman penyelenggaraan dan diseminasi program Kota Ramah HAM	Terbangunnya komitmen bersama dalam rangka mendirikan kota ramah HAM
4.	*Pilot project* advokasi implementasi indikator HAM di 4 (empat) sektor, yaitu kesehatan, pendidikan, pangan, dan perumahan	Advokasi penerapan indikator HAM di 4 (empat) sektor, yaitu kesehatan, pendidikan, pangan, dan perumahan	Individu dapat menikmati (*enjoyment*) hak asasinya
			Pemerintah menyusun program dan kebijakan
5.	KOMNAS HAM yang hijau, ramah dan manusiawi	Gedung bangunan yang mudah diakses dan hijau, serta layanan KOMNAS HAM yang manusiawi bagi pengadu	Proses pemberian layanan kepada masyarakat termasuk pengaduan dapat diberikan dengan baik melalui penerapan pelayanan yang ramah, cepat dan efektif dan didukung dengan suasana dan kondisi gedung dan ruangan yang nyaman.

BAB IV
PENUTUP

Roadmap Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 di KOMNAS HAM merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Roadmap Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Reformasi birokrasi KOMNAS HAM dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada *outcomes*. Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk mnghasilkan kinerja yang makin baik. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen dan menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh pegawai di KOMNAS HAM.

Roadmap Reformasi Birokrasi merupakan instrumen dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah. Dokumen ini agar menjadi pedoman bagi Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM, serta seluruh pegawai di lingkungan KOMNAS HAM dalam menyusun dan melaksanakan reformasi birokrasi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2018
Sekretaris Jenderal
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia



Tasdiyanto

NIP 197207201996031001